

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Landasan Ulin Utara merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.¹ Wilayah ini berada di bagian barat Kota Banjarbaru dan memiliki posisi yang cukup strategis karena berdekatan dengan wilayah Kabupaten Banjar serta kawasan Bandara Syamsudin Noor.²

Berdasarkan hasil observasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Landasan Ulin Utara cukup beragam. Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, pengemudi ojek, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya usaha makanan rumahan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap LPG 3 kg bersubsidi cukup tinggi, karena LPG 3 kg banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha kecil.

¹ Kelurahan Landasan Ulin Utara, *PROFIL - Kelurahan Landasan Ulin Utara* (Kelurahan Landasan Ulin Utara, n.d.), accessed June 21, 2026, <https://kel-landasanulinitara.banjarbarukota.go.id/profil/>.

² Kelurahan Landasan Ulin Utara, *Peta Wilayah - Kelurahan Landasan Ulin Utara* (Kelurahan Landasan Ulin Utara, n.d.), accessed June 21, 2026, <https://kel-landasanulinitara.banjarbarukota.go.id/peta-wilayah/>.

Dalam konteks pendistribusian LPG bersubsidi, Kelurahan Landasan Ulin Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki kebutuhan cukup besar terhadap LPG 3 kg. Hal ini disebabkan karena LPG 3 kg tidak hanya digunakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, wilayah ini juga berada pada jalur distribusi dari agen menuju pangkalan resmi, sehingga keberadaan pangkalan LPG memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara masih menghadapi beberapa kendala. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kg tidak selalu seimbang dengan jumlah pasokan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekosongan stok di pangkalan, antrean pembeli, serta meningkatnya pembelian LPG melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendistribusian LPG bersubsidi di wilayah ini penting untuk diteliti guna mengetahui bagaimana sistem pendistribusiannya serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

2. Hasil Wawancara dengan Informan

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pemilik pangkalan LPG bersubsidi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua RT, masyarakat sebagai konsumen rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan sopir pengangkut LPG

bersubsidi. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, penulis menggunakan kode dan nama samaran dalam penyajian data.

a. Informan I

Informan pertama adalah pemilik pangkalan LPG bersubsidi sekaligus Ketua RT dengan kode I-01 dan nama samaran Bapak AR.³ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa pangkalan yang dikelolanya mulai berjalan sekitar tahun 2022. Pangkalan tersebut dikelola dengan sistem lingkungan, sehingga penyaluran LPG bersubsidi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah RT setempat.

Informan menjelaskan bahwa pasokan LPG bersubsidi diterima dari agen. Adapun teknis distribusi dari pihak agen kepada Pertamina tidak diketahui secara langsung oleh informan karena pihak pangkalan hanya berhubungan dengan agen. Menurut informan, kuota normal LPG bersubsidi yang diterima pangkalan sekitar 400 tabung dalam satu bulan dengan dua kali pengiriman. Namun, dalam kondisi tertentu jumlah pasokan dapat berkurang, misalnya menjadi sekitar 150 tabung dalam satu kali pengiriman.

Dalam proses penyaluran kepada masyarakat, informan menerapkan sistem kartu kendali yang dibuat secara mandiri. Kartu tersebut digunakan untuk mengontrol pembelian LPG bersubsidi agar setiap warga memperoleh kesempatan yang sama. Setiap pemegang kartu diberikan kesempatan mengambil satu tabung terlebih dahulu

³ Bapak AR, Informan I, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

dalam jangka waktu sekitar dua hari. Setelah itu, apabila masih terdapat stok, warga dapat membeli kembali sesuai kebutuhan.

Menurut informan, sistem tersebut dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi LPG bersubsidi di wilayah RT yang beliau kelola. Oleh karena itu, warga di wilayah tersebut relatif tidak terlalu merasakan dampak kelangkaan karena penyaluran dilakukan secara terbatas dan bertahap. Namun, informan juga menyampaikan bahwa kebutuhan LPG bersubsidi semakin meningkat, terutama karena bertambahnya pelaku usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg untuk kegiatan usaha.

Informan juga menjelaskan bahwa harga jual LPG bersubsidi di pangkalan yang dikelolanya sebesar Rp22.000,00 per tabung. Harga tersebut telah diketahui oleh warga dan digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Informan menegaskan bahwa pengelolaan pangkalan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan warga di lingkungan RT setempat.

b. Informan II

Informan kedua adalah seorang masyarakat yang berstatus sebagai konsumen rumah tangga dengan kode I-02 dan nama samaran Bapak SN.⁴ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa dirinya masih menggunakan LPG bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, menurut informan, LPG

⁴ Bapak SN, Informan II, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

bersubsidi tidak selalu dapat diperoleh dari pangkalan karena waktu kedatangan LPG sering kali bertepatan dengan jam kerja.

Informan menjelaskan bahwa pada saat tidak dapat membeli LPG di pangkalan, dirinya terpaksa membeli LPG dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pangkalan. Menurut informan, harga LPG di tingkat pengecer berkisar antara Rp40.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun LPG bersubsidi tersedia di pangkalan, tidak seluruh masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Faktor waktu dan aktivitas pekerjaan menjadi salah satu kendala yang menyebabkan masyarakat harus membeli LPG dengan harga yang lebih tinggi di tingkat pengecer.

c. Informan III

Informan ketiga adalah ibu rumah tangga dengan kode I-03 dan nama samaran Ibu NH.⁵ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa dirinya kadang dapat membeli LPG bersubsidi di pangkalan, namun kadang juga tidak kebagian. Menurut informan, stok LPG di pangkalan sering kali cepat habis apabila terlambat sedikit saja mengambilnya.

Informan menyampaikan bahwa setelah LPG datang ke pangkalan, dalam waktu sekitar 15 menit stok sudah dapat habis dibeli masyarakat. Akibatnya, apabila informan tidak sempat datang tepat waktu, ia harus membeli LPG dari pengecer.

Harga LPG di tingkat pengecer menurut informan berkisar antara Rp30.000,00 sampai Rp40.000,00 per tabung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

⁵ Ibu NH, Informan III, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

keterbatasan waktu pengambilan dan cepat habisnya stok LPG di pangkalan menjadi kendala bagi masyarakat dalam memperoleh LPG bersubsidi dengan harga pangkalan.

d. Informan IV

Informan keempat adalah pelaku usaha mikro dengan kode I-04 dan nama samaran Ibu MS.⁶ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa dirinya menggunakan LPG bersubsidi untuk menunjang kegiatan usaha. Namun, informan mengaku sering mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi dari pangkalan karena alamat domisilinya bukan berasal dari wilayah setempat.

Akibat kondisi tersebut, informan lebih sering membeli LPG melalui pengecer. Harga LPG yang dibeli di tingkat pengecer berkisar antara Rp35.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung, bahkan informan lebih sering memperoleh LPG dengan harga sekitar Rp48.000,00 per tabung.

Informan menyampaikan bahwa tingginya harga LPG di tingkat pengecer cukup memberatkan bagi pelaku usaha mikro. Kenaikan biaya bahan bakar tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi, sedangkan untuk menaikkan harga jual barang dagangan juga tidak mudah karena dikhawatirkan dapat mengurangi minat pembeli.

⁶ Ibu MS, Informan IV, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

e. Informan V

Informan kelima adalah pelaku usaha mikro dengan kode I-05 dan nama samaran Bapak YD.⁷ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa dirinya menggunakan LPG bersubsidi untuk mendukung kegiatan usaha. Menurut informan, dirinya kadang dapat membeli LPG bersubsidi dari pangkalan dengan harga sekitar Rp22.000,00 per tabung.

Namun, informan juga sering tidak kebagian LPG di pangkalan sehingga harus membeli melalui pengecer. Harga LPG di tingkat pengecer menurut informan berkisar antara Rp35.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung.

Kondisi tersebut cukup memengaruhi biaya usaha karena LPG merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan produksi. Informan menyampaikan bahwa apabila tidak memperoleh LPG dari pangkalan, pilihan yang tersedia adalah membeli dari pengecer meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi.

f. Informan VI

Informan keenam adalah sopir pengangkut LPG bersubsidi dengan kode I-06 dan nama samaran Bapak FR.⁸ Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa proses distribusi LPG bersubsidi dilakukan sesuai dengan kuota dan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak agen.

Informan menyampaikan bahwa LPG bersubsidi diangkut dari pihak agen kemudian disalurkan kepada pangkalan-pangkalan sesuai dengan jumlah pasokan

⁷ Bapak YD, Informan V, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

⁸ Bapak FR, Informan VI, wawancara pribadi, 20 Juni 2026.

yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengiriman dapat mengalami kendala apabila terdapat keterlambatan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), hambatan transportasi, atau kondisi teknis lain dalam proses pengangkutan.

Menurut informan, apabila pengiriman mengalami keterlambatan, maka waktu kedatangan LPG di pangkalan juga ikut terlambat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan LPG di masyarakat, terutama apabila kebutuhan masyarakat sedang meningkat.

3. Ringkasan Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada enam informan, diperoleh informasi bahwa distribusi LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara menunjukkan kondisi yang beragam. Informan dari pihak pangkalan menjelaskan bahwa distribusi LPG di wilayah RT yang dikelolanya telah diupayakan secara merata melalui penggunaan kartu kendali dan pembatasan pembelian. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam memperoleh LPG bersubsidi, seperti keterbatasan waktu pengambilan, cepat habisnya stok LPG di pangkalan, serta ketergantungan pada pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

Selain itu, pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG bersubsidi sehingga sering membeli LPG dari pengecer dengan harga yang jauh di atas harga pangkalan. Di sisi lain, informan dari pihak distribusi menjelaskan bahwa penyaluran LPG bersubsidi telah dilakukan sesuai kuota dan jadwal yang ditetapkan, meskipun dalam kondisi tertentu dapat terjadi keterlambatan pengiriman

yang memengaruhi ketersediaan LPG di pangkalan. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa distribusi LPG bersubsidi telah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kemudahan akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Wawancara Informan Mengenai Pendistribusian LPG Bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara

No	Kode Informan	Peran Informan	Pokok Temuan
1	I-01	Pemilik pangkalan LPG sekaligus Ketua RT	Pendistribusian LPG di wilayah RT informan dilakukan dengan sistem kartu kendali. Setiap warga diberi kesempatan mengambil satu tabung terlebih dahulu agar penyaluran lebih merata. Kuota normal sekitar 400 tabung per bulan, namun dalam kondisi tertentu dapat berkurang.
2	I-02	Warga biasa	Kadang memperoleh LPG dari pangkalan, namun kadang tidak karena waktu kedatangan LPG berbenturan dengan pekerjaan. Jika tidak memperoleh LPG dari pangkalan, informan membeli di pengecer dengan harga Rp40.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung.
3	I-03	Ibu rumah tangga	Kadang memperoleh LPG dari pangkalan, namun sering tidak kebagian karena stok cepat habis. Menurut informan, sekitar 15 menit setelah LPG datang, stok sudah habis. Jika tidak kebagian, informan membeli di pengecer dengan harga Rp30.000,00 sampai Rp40.000,00 per tabung.
4	I-04	Pelaku UMKM	Lebih sering membeli LPG dari pengecer karena alamat domisili bukan wilayah setempat. Harga LPG di pengecer berkisar Rp35.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung dan sering diperoleh sekitar Rp48.000,00. Kondisi ini memberatkan biaya usaha.
5	I-05	Pelaku UMKM	Kadang memperoleh LPG dari pangkalan

			dengan harga sekitar Rp22.000,00 per tabung, namun sering tidak kebagian sehingga harus membeli dari pengecer dengan harga Rp35.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung.
6	I-06	Sopir pengangkut LPG bersubsidi	Distribusi LPG dilakukan sesuai kuota dan jadwal dari agen. Keterlambatan dapat terjadi karena hambatan transportasi, keterlambatan dari SPBE, atau kendala teknis lain dalam proses pengangkutan.

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara penulis 2026.

B. Analisis Data

Analisis terhadap pendistribusian LPG bersubsidi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori distribusi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, distribusi tidak hanya dipahami sebagai proses penyaluran barang dari satu pihak kepada pihak lain, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, kebutuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian LPG bersubsidi perlu dilihat bukan hanya dari segi alur penyalurannya, tetapi juga dari segi ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.⁹

Selain itu, pendistribusian LPG bersubsidi juga dapat dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam *nash*, tetapi sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

⁹ Madnasir, "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam," 59–60.

¹⁰ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," 65–66.

Dalam konteks ini, kebijakan subsidi LPG dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan karena bertujuan membantu masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar dapat memperoleh kebutuhan energi dengan harga yang lebih terjangkau.¹¹

Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai apabila pendistribusian LPG bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran. Apabila dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan stok, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, belum seragamnya pengendalian distribusi antarwilayah, atau lemahnya pengawasan, maka tujuan subsidi sebagai sarana kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, analisis dalam bagian ini diarahkan untuk melihat bagaimana sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara serta kendala-kendala yang memengaruhi tercapainya kemaslahatan dalam distribusi tersebut.

1. Sistem Pendistribusian LPG Bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara pada dasarnya dilakukan melalui jalur distribusi resmi. Jalur tersebut dimulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), kemudian disalurkan kepada agen LPG, selanjutnya diteruskan kepada pangkalan resmi, dan akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Dalam hal ini, pangkalan resmi memiliki peran penting sebagai tempat penyaluran LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat.

¹¹ Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, 30, Pasal 20 ayat (2).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa salah satu pangkalan LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara menerima pasokan dari agen dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kuota. Informan I-01 menjelaskan bahwa kuota normal pangkalan yang dikelolanya sekitar 400 tabung dalam satu bulan dengan dua kali pengiriman. Namun, dalam kondisi tertentu jumlah pasokan dapat berkurang, misalnya menjadi sekitar 150 tabung dalam satu kali pengiriman. Dalam penyalurannya, informan menerapkan sistem kartu kendali secara mandiri untuk mengatur pembelian LPG bersubsidi agar lebih merata kepada warga di wilayah RT yang dikelolanya.

Namun, kondisi distribusi di wilayah RT tersebut tidak sepenuhnya sama dengan kondisi yang dialami informan lain dari lokasi berbeda. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga masih kesulitan memperoleh LPG bersubsidi dari pangkalan karena keterbatasan waktu pengambilan, cepat habisnya stok, dan perbedaan domisili. Akibatnya, sebagian masyarakat dan pelaku usaha mikro membeli LPG dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp30.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara memiliki pola yang berbeda antarwilayah. Pada wilayah RT yang dikelola oleh informan I-01, distribusi relatif lebih terkendali karena adanya kartu kendali dan pembatasan pengambilan. Akan tetapi, pada wilayah lain masih ditemukan kendala akses, sehingga masyarakat dan pelaku usaha mikro tetap bergantung pada pengecer ketika tidak memperoleh LPG dari pangkalan.

Apabila dikaitkan dengan teori distribusi dalam hukum ekonomi syariah, distribusi tidak hanya dipahami sebagai proses penyaluran barang dari satu pihak kepada pihak lain, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan manfaat, kebutuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Pendistribusian LPG bersubsidi sebagai barang subsidi seharusnya diarahkan agar masyarakat yang berhak dapat memperoleh manfaatnya secara wajar, baik dari segi akses maupun harga. Oleh karena itu, keberadaan jalur pengecer yang menyebabkan harga LPG bersubsidi menjadi lebih tinggi menunjukkan bahwa fungsi distribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹²

Dengan demikian, sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara pada dasarnya telah berjalan melalui jalur resmi, yaitu dari agen kepada pangkalan dan kemudian kepada konsumen. Namun, pelaksanaan distribusi di lapangan belum sepenuhnya seragam antarwilayah. Pada wilayah tertentu, distribusi dapat berjalan lebih tertib karena adanya sistem kartu kendali dan pembatasan pengambilan. Sementara itu, pada wilayah lain masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh LPG bersubsidi dari pangkalan sehingga harus membeli melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi masih memerlukan pengawasan dan penataan agar akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi dapat lebih merata.

¹² Madnasir, "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam," 64–65.

2. Kendala-Kendala dalam Pendistribusian LPG Bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi terbatasnya akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi di pangkalan, keterlambatan distribusi, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta kesulitan yang dialami pelaku usaha mikro dalam memperoleh LPG bersubsidi secara terjangkau. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi di lapangan belum sepenuhnya berjalan merata pada setiap wilayah.

Kendala pertama adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi di pangkalan. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga dengan waktu pengambilan. Informan I-02 menyampaikan bahwa dirinya kadang tidak memperoleh LPG dari pangkalan karena waktu kedatangan LPG berbenturan dengan pekerjaan. Sementara itu, informan I-03 menyampaikan bahwa stok LPG di pangkalan dapat habis dalam waktu sekitar 15 menit setelah kedatangan, sehingga masyarakat yang terlambat datang harus membeli LPG dari pengecer.

Kendala kedua adalah keterlambatan distribusi. Berdasarkan keterangan informan I-06 selaku sopir pengangkut LPG bersubsidi, distribusi LPG dilakukan berdasarkan kuota dan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak agen. Namun, dalam pelaksanaannya pengiriman dapat mengalami keterlambatan karena hambatan transportasi, keterlambatan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), atau kendala

teknis lain dalam proses pengangkutan. Keterlambatan tersebut dapat memengaruhi waktu kedatangan LPG di pangkalan dan berdampak pada ketersediaan LPG bagi masyarakat.

Kendala ketiga adalah perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga LPG di pangkalan dan di pengecer. Berdasarkan hasil wawancara, harga LPG di pangkalan berada pada kisaran Rp22.000,00 per tabung. Sementara itu, harga LPG di tingkat pengecer berkisar antara Rp30.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung. Perbedaan harga tersebut dirasakan cukup memberatkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan LPG untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha.

Kendala keempat adalah kesulitan pelaku usaha mikro dalam memperoleh LPG bersubsidi secara terjangkau. Informan I-04 menjelaskan bahwa dirinya lebih sering membeli LPG melalui pengecer karena alamat domisilinya bukan berasal dari wilayah setempat. Sementara itu, informan I-05 menyampaikan bahwa dirinya kadang dapat membeli LPG dari pangkalan, tetapi sering tidak kebagian sehingga harus membeli dari pengecer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala dalam mengakses LPG bersubsidi, padahal LPG merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan usaha mereka.

Kendala kelima adalah belum seragamnya pengendalian distribusi LPG bersubsidi pada setiap wilayah. Berdasarkan hasil wawancara, informan I-01 telah menerapkan kartu kendali untuk membatasi dan mengatur pembelian LPG bersubsidi di wilayah RT yang dikelolanya. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya sama

dengan wilayah lain, karena masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha mikro yang kesulitan memperoleh LPG dari pangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian distribusi LPG bersubsidi belum berjalan secara merata pada seluruh wilayah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam pendistribusian LPG bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pasokan, tetapi juga dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses LPG bersubsidi di pangkalan. Meskipun pada salah satu wilayah RT telah diterapkan kartu kendali, masyarakat dari wilayah lain masih mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi karena stok cepat habis, waktu pengambilan yang terbatas, serta perbedaan domisili. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian distribusi LPG bersubsidi masih perlu ditingkatkan agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Apabila dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*, pendistribusian LPG bersubsidi pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. *Maslahah mursalah* digunakan untuk melihat suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam *nash*, tetapi sejalan dengan tujuan syariat, yaitu memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan.¹³ Dalam konteks pendistribusian LPG bersubsidi, kemaslahatan tersebut dapat tercapai apabila

¹³ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," 65–66.

LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Namun, adanya kendala akses terhadap LPG bersubsidi, cepat habisnya stok di pangkalan, keterlambatan distribusi, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta belum seragamnya pengendalian distribusi antarwilayah menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, karena mereka harus membeli LPG dengan harga yang lebih tinggi atau mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi ketika stok di pangkalan habis.

Dengan demikian, kendala-kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara menunjukkan bahwa sistem distribusi yang berjalan masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal pemerataan akses, pengendalian distribusi antarwilayah, dan pengawasan harga di tingkat pengecer. Perbaikan tersebut penting dilakukan agar LPG bersubsidi tidak hanya tersedia secara formal melalui pangkalan, tetapi juga benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik dari pihak terkait, pendataan konsumen yang lebih tertib, serta mekanisme distribusi yang lebih merata agar tujuan subsidi sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.